

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENJUALAN PERSEDIAAN PADA PT. NASKA PERKASA

NUR TAUFIK BASIR



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024



SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENJUALAN PERSEDIAAN PADA PT. NASKA PERKASA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

NUR TAUFIK BASIR
A031191031



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024



SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENJUALAN PERSEDIAAN PADA PT. NASKA PERKASA

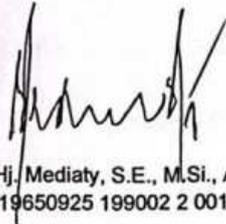
disusun dan diajukan oleh

NUR TAUFIK BASIR
A031191031

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 18 Januari 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, CWM
NIP. 19650925 199002 2 001

Pembimbing II



Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP. 19761105 200701 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19660307 199403 1 003

iii

Scanned with CamScanner



SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENJUALAN PERSEDIAAN PADA PT. NASKA PERKASA

disusun dan diajukan oleh

NUR TAUFIK BASIR
A031191031

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **18 Januari 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, CWM	Ketua	1.
2	Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2.
3	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M. Soc, Sc, CA	Anggota	3.
4	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA	Anggota	4.

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

iv



Scanned with CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nur Taufik Basir

NIM : A031191031

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENJUALAN PERSEDIAAN PADA PT. NASKA PERKASA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Januari 2024

Yang membuat pernyataan


Nur Taufik Basir



Scanned with CamScanner

PRAKATA

Puji Syukur atas Rahmat serta karunia Allah *subhanahu wata'ala* yang telah memberikan segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* yang telah memberikan pedoman dan suri tauladan terbaik hingga akhir zaman.

Kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya karena masih memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan ilmu serta kemudahan dalam menjalani proses perkuliahan dari awal hingga mendapatkan gelar sarjana. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada mereka peneliti ucapkan terima kasih :

1. Ucapan terima kasih yang sangat dalam kupersembahkan kepada orang tua tercinta Bapak H. Muhammad Basir dan Ibu Hj. Ragwan Makarau yang senantiasa memberikan dukungan moril dan meteril serta doa restu kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
2. Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, CWM dan Ibu Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA sebagai tim penasehat atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.



3. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA dan Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak.,M.SA, CA sebagai penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan kepada peneliti.
4. Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku penasehat akademik yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan kepada peneliti, semoga ilmu yang diberikan berguna bagi peneliti dan menjadi sebuah amal jariyah.
5. Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama masa studi. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Terima kasih kepada Direktur PT. Naska Perkasa dan segenap karyawan yang telah bersedia diwawancarai untuk penyusunan skripsi yang dilakukan oleh peneliti.
7. Terima Kasih kepada uki yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam penelitian yang dilakukan peneliti.
8. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu menghibur dalam penyusunan skripsi ini Bima, Faqih, Aqsa, Helmi, Gofaldi, Rein, Ahsan.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi 2019 19NITE Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas kebersamaan hingga akhir studi.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman KEMA IMA yang telah menjadi wadah bagi saya untuk menambah ilmu dan wawasan dalam berorganisasi.



Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi yang mungkin tidak disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

STATE OF THE NATIONAL CONTROL SYSTEM FOR WAREHOUSE
SALAH APTI, NURKA PERKASA

NURKA PERKASA
Mahasiswa
Fakultas

Makassar, 18 Januari 2024

NUR TAUFIK BASIR

Perintah ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas sebagai mahasiswa S1 Sistem Informasi pada jenjang pendidikan sarjana yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik sebagai salah satu sumber belajar. Pada jenjang ini diharapkan bahwa dengan penerapan media elektronik pada jenjang pendidikan sarjana dapat meningkatkan kemampuan kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh mahasiswa dengan penerapan media elektronik pada jenjang pendidikan sarjana yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik sebagai salah satu sumber belajar. Pada jenjang ini diharapkan bahwa dengan penerapan media elektronik pada jenjang pendidikan sarjana dapat meningkatkan kemampuan kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh mahasiswa dengan penerapan media elektronik sebagai salah satu sumber belajar. Pada jenjang ini diharapkan bahwa dengan penerapan media elektronik pada jenjang pendidikan sarjana dapat meningkatkan kemampuan kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh mahasiswa dengan penerapan media elektronik sebagai salah satu sumber belajar.

Di Makassar, 18 Januari 2024
Nur Taufik Basir

The purpose of this command is to provide information regarding the implementation of the National Control System for Warehouse (NCSW) on the level of undergraduate education. The command is issued to the students of the Faculty of Information Systems, State of the National Control System for Warehouse, Makassar. The purpose of this command is to provide information regarding the implementation of the NCSW on the level of undergraduate education. The command is issued to the students of the Faculty of Information Systems, State of the National Control System for Warehouse, Makassar. The purpose of this command is to provide information regarding the implementation of the NCSW on the level of undergraduate education. The command is issued to the students of the Faculty of Information Systems, State of the National Control System for Warehouse, Makassar.

Makassar, 18 Januari 2024
Nur Taufik Basir

Scanned with CamScanner



ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENJUALAN PERSEDIAAN PADA PT. NASKA PERKASA

ANALYSIS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR INVENTORY SALES AT PT. NASKA PERKASA

Nur Taufik Basir
Mediaty
Rahmawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal berbasis COSO yaitu lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian terhadap PT Naska Perkasa. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal penjualan persediaan PT. Naska Perkasa pada lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian telah dirancang dengan baik dan sesuai dengan prinsip yang terdapat pada komponen pengendalian persediaan yang diambil dari teori COSO. Diantaranya adalah indikator pengawasan manajemen, praktik kebijakan, sistem prosedur pencatatan, pengendalian akses, dan verifikasi independen. Adapun terdapat ketidaksesuaian pada komponen aktivitas pengendalian, dimana pada bagian administrasi belum melakukan pemisahan terhadap tugas dan wewenang yang mengakibatkan terjadinya perangkapan tugas.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Penjualan, Persediaan, Aktivitas Pengendalian, Lingkungan Pengendalian, COSO, PT. Naska Perkasa.

This research aims to determine and evaluate the implementation of a COSO-based internal control system, namely the control environment and control activities of PT Naska Perkasa. The research method used is descriptive qualitative using interviews, observation and documentation as data collection techniques. The results of this research indicate that the internal control system for inventory sales PT. Naska Perkasa the control environment and control activities have been well designed and in accordance with the principles contained in the inventory control components taken from COSO theory. Among them are indicators of management supervision, policy practices, recording procedure systems, access control, and independent verification. There is a discrepancy in the components of control activities, where the administration has not separated tasks and authorities, which has resulted in duplication of duties.

d: Internal Control System, Sales, Inventory, Control Activities, Control Environment, COSO, PT. Naska Mighty.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal.....	8
2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal.....	9
2.1.3 Komponen Pengendalian Internal.....	10
2.1.4 Jenis-Jenis Sistem Pengendalian Internal.....	18
2.1.5 Prinsip-Prinsip Sistem Pengendalian Internal.....	19
2.1.6 Keterbatasan Pengendalian Internal.....	19
2.1.7 Pengertian Persediaan.....	20
2.1.8 Jenis-Jenis Persediaan.....	23
2.1.9 Fungsi Persediaan.....	25
2.1.10 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persediaan.....	28
2.1.11 Metode Pencatatan Persediaan.....	28
2.1.12 Metode Penilaian Persediaan.....	29
2.1.13 Biaya-Biaya Persediaan.....	30
2.1.14 Model-Model Persediaan.....	31
2.1.15 Pengendalian Internal Persediaan.....	31
2.1.16 Prosedur-Prosedur Pengendalian Persediaan Barang Dagang.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Rancangan Penelitian.....	40
3.2 Kehadiran Peneliti.....	41
3.3 Lokasi Penelitian.....	42
3.4 Sumber Data.....	43



3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Analisis Data	45
3.7 Pengecekan Validitas Temuan.....	48
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.4.1 Profil PT. Naska Perkasa	52
4.4.2 Visi dan Misi PT. Naska Perkasa	54
4.4.3 Analisis Triangulasi.....	54
4.4.4 Struktur Organisasi PT. Naska Perkasa	55
4.4.5 Deskripsi Pekerjaan (<i>Job Description</i>)	57
4.2 Sistem Pengendalian Internal Persediaan Gas LPG PT. Naska Perkasa.....	59
4.3 Aktivitas Bagian Perusahaan	61
4.4 Hasil Dan Pembahasan Penelitian	66
4.4.1 Lingkungan Pengendalian PT. Naska Perkasa	66
4.4.2 Aktivitas Pengendalian PT. Naska Perkasa.....	71
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	34
4.1 Data Produk Gas Elpiji 3 Kg Periode 2018-2023	55
4.2 Daftar Harga 2018-2023	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	39
4.1 Struktur Organisasi PT. Naska Perkasa	56
4.2 Prosedur Pemesanan Gas Elpiji	62
4.3 Tahap-Tahap Penjualan Gas Elpiji	64
4.4 Sistem Otorisasi Pencatatan	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	84
2 Instrument Penelitian	85
3 Hasil Wawancara	86
4 Dokumentasi	92
5 Surat Telah Melakukan Penelitian.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada tahun 2019 silam, staf administrasi yang kurang teliti dalam pemberian jadwal pengantaran kepada sopir yang akan membawakan gas LPG 3 Kg kepada pangkalan LPG 3 Kg. Dalam kasus ini staf administrasi tidak melakukan *double checking* terhadap catatan pengantaran sehingga pengantaran kepada pelanggan menjadi *double* atau pengantaran dua kali dan karena adanya hal ini terjadi keterlambatan pengantaran ke pangkalan lain yang harusnya telah terjadwal berdasarkan laporan perencanaan penyaluran gas LPG 3 Kg menjadi mundur hari pengantarannya dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pangkalan LPG 3 Kg.

Tidak bisa dipungkiri bahwa fakta yang terjadi pada fenomena globalisasi khususnya yang mengarah pada isu ekonomi memberikan efek signifikan pada lembaga usaha atau perusahaan yang konteksnya milik swasta ataupun negara. Era Globalisasi akan mempertajam persaingan-persaingan diantara perusahaan, sehingga perlu pemikiran yang makin kritis atas pemanfaatan secara optimal penggunaan berbagai sumber dana dan daya yang ada yang telah tersedia supaya lebih maksimal (Puspitasari & Haryani, 2018:1). Dengan semakin berkembangnya perusahaan ke arah positif sudah pasti akan menjumpai beragam keadaan yang sifatnya kian kompleks, sehingga untuk pihak pimpinan cenderung kesulitan mewujudkan taktik pengawasan sekaligus koordinasi langsung pada keseluruhan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.



Perusahaan dagang bisa dikaitkan dengan eksistensi dari suatu organisasi yang mewujudkan usaha dengan langkah pembelian aneka barang dari lembaga usaha lain lalu didistribusikan ke masyarakat. Ada beberapa hal penting dalam sebuah perusahaan dagang yaitu persediaan, karena jika tidak akuratnya sebuah sistem pencatatan persediaan akan berdampak terjadinya penyimpangan dalam pencatatan dalam pendistribusian stok kepada pembeli atau konsumen.

Lembaga usaha atau dalam hal ini erat kaitannya dengan penyebutan perusahaan bisa diberikan label baik secara pengendalian internal bisa diamati dari *fraud* dan *error* yang kehadirannya kurang atau tidak begitu kentara. Tidak hanya itu, bisa juga diamati pada kondisi tepat dan andal suatu informasi yang disuguhkan pihak manajemen perusahaan terkait aneka data. Bagaimanapun juga, data terkait ketersediaan barang wajib sifatnya akurat dan valid sesuai kondisi fisik barang tersebut. Jika ada insiden selisih antara laporan dan keadaan fisiknya, bisa dikatakan kalau belum efektifnya sistem kendali internal persediaan lembaga usaha yang bersangkutan tersebut. Dari kasus ini bisa diambil tindakan konkret berupa upaya investigasi secara mendalam.

Bisa diberikan pengertian apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal (SPI) yang merujuk kepada skema pengaturan terkait konfigurasi dari sebuah organisasi yang di dalamnya memuat cakupan ukuran dan metode yang diupayakan pengkoordinasian guna mempertahankan kelayakan, pemantauan, sekaligus menjadi pendorong suatu kebijakan dalam ranah manajemen itu dipatuhi secara tertib. Bagaimanapun juga pihak dari suatu perusahaan yang bersangkutan wajib menggunakan unsur yang terkandung pada SPI dengan bijaksana dan paya meminimalkan angka kecurangan dalam kegiatan operasionalnya.



Menurut Mulyadi, (2002:180) Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai berikut: (1) adanya pemisahan dari segi fungsi yang diimplementasikan dengan lugas; (2) memuat sistem otorisasi sekaligus prosedur yang berhubungan dengan pencatatan; (3) praktik kegiatan yang sehat tanpa dibumbui unsur yang merugikan pihak bersama; (4) para pegawai yang dinilai memiliki kompetensi dan kecakapan.

Usaha yang bisa diupayakan oleh suatu lembaga usaha ialah dengan praktik pengelolaan dan peningkatan keseluruhan kegiatan supaya bisa melanggengkan eksistensi dalam persaingan aktivitas usaha yang pada akhirnya bisa meraup tujuan yang sudah ditetapkan.

Definisi persediaan lekat dengan aset lancar yang jumlahnya relatif besar, terutama untuk perusahaan dagang. Jumlah persediaan yang relatif besar serta dengan jumlah total terjadinya transaksi yang termasuk sering memungkinkan terjadinya salah saji yang besar juga. Persediaan yang alokasinya tersebar di beberapa titik menimbulkan kesulitan dalam perhitungan fisik. Bagi pihak internal perusahaan kesalahan dalam penyajian nilai persediaan dapat mengakibatkan kesalahan dalam operasional pemasaran, sedangkan bagi pihak eksternal kesalahan seperti itu menyuguhkan keterangan yang justru sifatnya menyesatkan terkait profitabilitas dan kapabilitas suatu lembaga usaha dalam menyelesaikan apa saja yang menjadi tuntutan dari kewajiban *financial*.

Persediaan memiliki banyak risiko salah satunya adalah pencurian. Kebocoran barang, pendapatan penjualan yang kurang, kesalahan dalam pencatatan permintaan, dikeluarkannya barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli dan banyaknya kemungkinan yang dapat membuat pencatatan persediaan berbeda dengan stok persediaan yang ada di gudang. Karena itu diperlukannya pengendalian internal persediaan untuk melindungi aset



dan pencatatan persediaan dapat dipercaya. Seperti yang sudah digambarkan sebelumnya kalau persediaan bisa diartikan sebagai bentuk aktiva

yang ada untuk kemudian dilakukan skema transaksi penjualan dalam usaha yang sifatnya normal terkait aktivitas produsen atau dalam konteks perjalanan ke bentuk bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan demi kelancaran kegiatan produksi suatu barang atau pemberian jasa (Manengkey, 2014:14).

Jika dikaitkan dengan persediaan dari lembaga usaha tentu ada korelasi dengan proses menyusun laporan yang bisa diartikan sebagai komponen terpenting dikarenakan di dalamnya memuat neraca sekaligus laporan keuntungan yang berkaitan dengan nilai persediaan barang dagang. Perlu digarisbawahi kalau ada potensi masalah yang berhubungan dengan sistem pencatatan dan penilaian persediaan yang mana hal ini bisa mendatangkan konsekuensi pada laporan laba rugi dan neraca, untuk itu pihak lembaga usaha yang bersangkutan harus berpatokan pada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang secara spesifik bisa dikaitkan dengan PSAK alias Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 yang menjelaskan dengan sangat gamblang terkait akuntansi persediaan yang menjadi bagian dari pedoman untuk melanggengkan perlakuan akuntansi persediaan itu sendiri.

PT. Naska Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi gas LPG 3 KG. Perusahaan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, dalam mengelola persediaannya PT. Naska Perkasa melakukan penerapan sistem pengendalian atas persediaannya. Salah satu bentuk penerapan sistem pengendalian internalnya dengan menggunakan sistem *Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadaway Comission (COSO)* sebagai pengendali persediaan, serta pengendalian quality menggunakan metode *First-In First-out*



Beberapa penelitian yang meneliti terkait pengaruh pengendalian internal persediaan terhadap kualitas laporan persediaan yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Lisa dan Jenny, 2017), (Amanah Tontoli et al., 2017), dan (Ayu dan Guritno, 2021) menunjukkan bahwa dengan menerapkan pengendalian internal atas persediaan barang dagang sangat mempengaruhi keefektifan pengendalian persediaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Pujiono, 2019) pengendalian internal yang dilakukan belum memadai karena tidak adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab fungsional dalam perusahaan. Serta adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, maka penulis memutuskan untuk meneliti terkait kualitas laporan persediaan dengan mereplikasi penelitian sebelumnya dan menambahkan variabel baru serta objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penjualan Persediaan Pada Perusahaan PT.Naska Perkasa”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem lingkungan pengendalian penjualan gas 3 Kg bersubsidi pada perusahaan PT. Naska Perkasa?
2. Bagaimana aktivitas pengendalian penjualan gas 3 Kg bersubsidi pada perusahaan PT. Naska Perkasa?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan penelitian

1 sebagai berikut.



1. Untuk mengetahui bagaimana sistem lingkungan pengendalian penjualan gas 3 Kg bersubsidi pada perusahaan PT. Naska Perkasa.
2. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas pengendalian penjualan gas 3 Kg bersubsidi pada perusahaan PT.Naska Perkasa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan konteks yang akan diteliti, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan teoretis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal atas persediaan pada perusahaan PT. Naska Perkasa serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis di pelajari dibangku perkuliahan serta sebagai referensi untuk para akademisi yang ingin melakukan pengembangan penelitian yang serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis penelitian ini

Penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengendalian internal atas persediaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengendalian internal atas persediaan serta laporan persediaan agen elpiji 3 Kg bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.



3. Bagi perusahaan Agen Elpiji 3 Kg

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Agen Elpiji agar memaksimalkan pengendalian internal atas persediaan gas elpiji 3 Kg untuk mengoptimalkan sistem penjatahan gas 3 Kg yang bersubsidi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Hery, (2015:159) disebutkan bahwa maksud dari sistem pengendalian internal ialah keseluruhan dari perangkat kebijakan dan prosedur khusus yang memiliki fungsi perlindungan pada kekayaan lembaga usaha dari setiap bentuk hal-hal negatif termasuk penyelewengan sekaligus memberikan jaminan terhadap keadaan real informasi akuntansi lembaga usaha terkait dengan kredibel dan akurat serta memberi kepastian kalau keseluruhan daripada ketentuan dan kebijakan manajemen sudah berjalan dan dipatuhi oleh setiap pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Menurut Lisa dan Jenny, (2017:1224) menambahkan keterangannya juga terkait isu ini yang mengarah ke skema proses untuk diwujudkan oleh pihak pemangku jabatan mulai dari dewan direksi, manajemen, hingga keseluruhan staff karyawan untuk menyuguhkan jaminan secara benar-benar memadai atas tujuan pengendalian yang sudah tercapai dengan cakupannya berupa efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional lalu berkaitan juga dengan reliabilitas laporan finansial dan tidak lupa kesesuaian aturan dan regulasi yang ada pada perusahaan tersebut. *COSO (The Committee of Sponsoring Organizations)* tidak ketinggalan memberikan definisi teoritisnya, ialah serangkaian proses implementasi dewan direksi, pihak manajemen sekaligus semua karyawan dengan arahan supaya bisa memberikan jaminan yang benar-benar pantas atas tujuan pengendalian yang hendak dicapai.



COSO yang dikutip Bodnar dan Hopwood, (2008:182) menambahkan kalau masuk proses yang di dalamnya melibatkan peran serta pihak dewan

komisaris, para manajemen, dan personil lain yang sengaja dibentuk guna menyuguhkan keyakinan secara benar-benar matang terkait tujuan pengendalian yang diupayakan untuk dicapai.

Pengendalian internal memiliki fungsi yang sangat krusial karena hal ini berkaitan dengan lini dean guna memberikan penjagaan pada aktiva sekaligus menjadi detektor akan kesalahan penyelewengan, bentuk kecurangan, atau hal-hal yang sifatnya melanggar putusan peraturan dari aturan konstitusi negara yakni perundang-undangan (Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), 2017). Berpatokan pada gagasan yang sudah dikemukakan di atas bisa ditarik konklusi kalau sistem pengendalian internal memang sangat krusial bagi perusahaan dalam usaha memberikan perlindungan aset dan menjadi upaya untuk melakukan pencegahan atas tindak kecurangan oknum yang tidak bertanggung jawab.

2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi, (2002:180) terkait tujuan dari pengendalian intern, sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi
Sudah menjadi rahasia umum kalau hal-hal yang sifatnya fisik yang memiliki nilai sangat rentan terhadap tindak pencurian. Bisa juga disalahgunakan atau karena keteledoran bisa hancur kecuali kalau ada pengendalian secara memadai. Hal ini sama halnya dengan aset atau kekayaan yang dipunyai suatu organisasi usaha yang sifatnya berwujud fisik misalnya piutang dagang. Hal tersebut memiliki sifat yang sangat rawan oleh tindak kecurangan jika tidak dilakukan penjagaan secara ketat terhadap dokumen penting yang terlibat.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
Pihak manajemen pasti membutuhkan informasi secara akurat terkait finansial yang hendak diteliti guna melangsungkan aktivitas operasional usaha. Terdapat banyak informasi yang berbau akuntansi yang dijadikan pedoman serta pijakan bagi manajemen untuk membuat putusan yang sangat penting. Oleh karenanya, perlu pengendalian internal guna menghadirkan jaminan terhadap proses olah data yang merefleksikan perubahan atas aset yang dimiliki organisasi.



3. Mendorong efisiensi

Hal ini berkaitan dengan upaya publikasi yang dirasa tidak dibutuhkan atau hanya mendatangkan keadaan yang boros dari segi usaha bisnis perusahaan sekaligus menjadi alat pencegahan dari eksploitasi sumber daya yang sifatnya tidak begitu efisien untuk dilangsungkan.

4. Mendorong kepatuhan pada kebijakan manajemen

Menurut Wiratna Sujarweni, (2015:69) diterangkan dengan gamplang jika tujuan pokok lembaga usaha merancang sistem pengendalian internal ada berbagai hal seperti: (1) difungsikan sebagai penjagaan terhadap aset atau kekayaan suatu perusahaan yang terkait; (2) memupuk kedisiplinan untuk mematuhi serangkaian putusan manajemen yang telah disahkan; (3) memberikan penjagaan terhadap laporan keuangan yang akurat; (4) memberikan penjagaan terhadap lancarnya kegiatan di perusahaan terkait; (5) bagi setiap lapisan yang ada di suatu perusahaan wajib hukumnya untuk patuh pada serangkaian aturan dan hukum yang telah ada.

2.1.3 Komponen Pengendalian Internal

Mulyadi, (2002:183) memaparkan beragam komponen dari pengendalian internal COSO, berikut ini:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian ini memuat berbagai hal mulai dari prosedur, kebijakan, sekaligus tindakan yang merefleksikan perilaku secara menyeluruh oleh pihak manajemen puncak, dewan komisaris, para direktur, serta pemilik satuan usaha yang dimaksud (Mulyadi, 2002:183).

Dari definisinya bisa dipahami bersama kalau pengendalian yang sifatnya efektif di dalam organisasi menduduki sikap dari pihak manajemen. Dengan kata lain, lingkungan menjadi faktor pembentuk dari konfigurasi serta disiplinnya suatu organisasi. Seperti yang sudah dipaparkan terkait cakupan dari lingkungan pengendalian menjadi gambaran menyeluruh atas sikap oleh berbagai pihak yang terlibat yang memiliki konektivitas terhadap pengendalian secara internal sekaligus krusialnya hal tersebut yang dikaitkan dengan suatu entitas demi tujuan general



memberi kemudahan pemahaman dan penilaian ke lingkungan internal itu sendiri.

lingkungan pengendalian punya elemen krusial, sebagai berikut:

a. Falsafah dan Gaya manajemen operasi

Bisa dipahami bersama mengenai definisi dari falsafah manajemen yang merujuk pada perangkat parameter suatu perusahaan sekaligus cakupannya adalah para pekerja di dalamnya. Bisa dikatakan kalau falsafah adalah hal-hal yang harus dikerjakan dan tidak oleh lembaga usaha yang bersangkutan. Melalui skema aktivitas yang dilaksanakan pihak manajemen menyuguhkan tanda secara gamblang kepada para pekerja terkait krusialnya pengendalian itu diwujudkan dengan konkrit. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai gaya operasi bisa menjadi refleksi atas ide seorang manajer terkait prosedur kegiatan yang memang harus dilakukan dan yang sebaiknya tidak (Mulyadi, 2002:186).

b. Struktur Organisasi

Menurut Bodnar dan George, (2003:174) memberikan gagasannya terkait struktur organisasi yang bisa dikaitkan dengan sebuah pola dari tanggung jawab dan otoritas yang memang ada dan bereksistensi di suatu organisasi berbadan usaha. Ada korelasi signifikan di dalam organisasi yang mengacu pada isu formalitas. Bagan dari organisasi ini menjadi petunjuk akan garis arus yang berlaku.

Sari, (2013:3) yang termasuk keadaan baik dari konfigurasi organisasi harus bisa memenuhi berbagai komponen spesifik, seperti:

1. Aktivitas yang terspesialisasi.
2. Aktivitas yang sudah mengalami standarisasi secara progresif.
3. Aktivitas yang di dalamnya memuat koordinasi efektif.
4. Aktivitas yang menitikberatkan pada sentralisasi sesuai beban yang diemban setiap individu.
5. Dan yang terakhir berkaitan dengan kapasitas unit kerja.



c. Komite Audit

Perlu dipahami kalau dewan komisaris bisa dikatakan efektif ialah pihaknya yang mampu menjadi figur independen dari manajemen maupun para anggota yang telah dinilai secara aktif. Beban atau tanggungan dari pengadaan laporan keuangan cenderung dilimpahkan kepada komite audit yang dalam tugasnya mencakup struktur pengendalian intern sekaligus ketaatan pada ketetapan dan aturan konstitusi yang berlaku.

Dengan begitu pihak yang menjadi komite audit wajib melakukan pemeliharaan komunikasi yang diupayakan secara langsung dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak berwenang mulai dari dewan komisaris, audit internal, ataupun eksternal supaya sistem pengendalian itu semakin efektif tercapai (Mulyadi, 2002:186).

d. Penetapan Wewenang dan Tanggungjawab

Metode dalam kaitannya dengan komunikasi secara formal terkait wewenang dan tanggung jawab sekaligus masalah sejalur yang ada korelasi dengan pengendalian juga sama penting selain aspek dari komunikasi informasi itu sendiri.

Cakupan ini sangat kompleks karena melibatkan mekanisme memo dari pihak manajemen terkait krusialnya pengendalian dan problematika yang ada, penjabaran tugas para pekerja, putusan terkait, organisasi formal, perencanaan kegiatan operasional, serta dokumen dari kebijakan yang merefleksikan tindakan pegawai salah satunya unsur beda kepentingan dan kode etik (Mulyadi, 2002:186).

e. Metode Pengawasan Manajemen

Poin selanjutnya ini bisa dijabarkan sebagai salah satu metode yang dilibatkan pihak manajemen guna melakukan pemantauan terhadap kegiatan di setiap fungsi dan setiap anggota dari suatu organisasi yang dilibatkan.



Menurut Bodnar dan George, (2003:178) diterangkan jika metode pengendalian dari manajemen sendiri ada berbagai teknik yang dilibatkan guna menyampaikan perintah dan tujuan operasi untuk pegawai di hierarki bawah dan sebagai alat untuk melanggengkan proses evaluasi terhadap hasil yang ada.

f. Fungsi Audit Intern

Hal ini sengaja dibuat dalam mekanisme satuan usaha untuk kemudahan pemantauan dari kebijakan yang dinilai telah efektif sekaligus prosedur tertentu yang masih ada korelasinya dengan pengendalian itu sendiri. Guna memaksimalkan tingkat efektif fungsi audit intern, ada yang namanya staf bersifat independen yang diambil dari bagian operasi dan akuntansi yang sifatnya menjadi krusial. Tidak lupa melaksanakan tugas dengan melaporkan hasil ke tingkat manajemen dengan hierarki lebih tinggi bisa berupa puncak atau komite audit dari dewan komisaris dan direksi (Mulyadi, 2002:186).

g. Praktik dan Kebijakan Karyawan

Bagaimanapun juga pengendalian intern bisa dicapai dengan sekumpulan usaha manusia yang tergabung dalam suatu organisasi maka bisa dipastikan kalau keanggotaan menjadi elemen yang dinilai paling krusial pada struktur pengawasannya. Selain itu, tujuan pengendalian intern harus dinilai relevan pada individu yang memang menjalankan tugasnya tersebut.

Perlu digaris bawahi kalau perusahaan memiliki pekerja yang menjunjung tinggi kompetensi dan kejujuran, maka kebijakan sekaligus prosedur yang ada bisa dinilai baik dalam penerimaan pegawai, menilai prestasi, kompetensi karyawan yang dikembangkan, serta apresiasi atas prestasi dan tidak keberatan memberikan kompensasi jika memang diperlukan (Mulyadi, 2002:186).

h. Pengaruh Ekstern

Didefinisikan sebagai pengaruh yang sudah diputuskan dan diimplementasikan pihak luar dari lembaga usaha yang mendatangkan pengaruh pada kegiatan operasional dan praktik dari usaha perusahaan tersebut. Cakupannya mulai dari pemantauan dan kepatuhan pada syarat yang sudah diputuskan badan legislatif dan instansi yang memang memiliki

s terhadap pengaturan.



Hal ini biasanya dipegang oleh pihak luar dari perusahaan yang memiliki pengaruh bisa memicu kesadaran serta perilaku manajemen pada pelaporan operasi usaha sekaligus menjadi desakan pihak manajemen untuk memutuskan kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan pengendalian intern (Mulyadi, 2002:186).

2. Penilaian Risiko

Menurut Hall Singleton, (2007:29) mengatakan kalau perusahaan wajib melaksanakan penilaian risiko guna melanggengkan proses identifikasi, analisis, serta pengelolaan terhadap resiko yang masih bersangkutan dengan laporan keuangan. Penilaian risiko ini diperuntukkan bagi upaya untuk meminimalkan risiko di tingkat minimum guna menjadi pertimbangan pada konteks manfaat dan biaya yang harus dikerahkan. Sementara pihak manajemen yang melaksanakan penilaian risiko memang memiliki tujuan spesifik yakni menetapkan skema mengatasi risiko yang sudah berhasil teridentifikasi secara valid. Penilaian risiko ini termasuk komponen nomor 2 dari pengendalian internal yang mana hal tersebut termasuk aktivitas yang diupayakan oleh pihak manajemen dalam melangsungkan proses identifikasi dan penganalisisan dari risiko yang menjadi faktor penghambat lembaga usaha dalam urusan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Fakta lain mengungkapkan kalau risiko bisa berasal dari segi internal atau eksternal dari suatu lembaga usaha.

3. Aktivitas Pengendalian

Menurut Hall Singleton, (2007:32), menerangkan perihal *control activity* atau aktivitas pengendalian sebagai putusan dan prosedur yang dilibatkan guna menjadi kepastian jika tindakan yang sudah tepat telah diimplementasikan sebagai bentuk penanganan akan beragam risiko yang sudah berhasil teridentifikasi.



pengendalian termasuk bagian dari prosedur sekaligus kebijakan suatu usaha. Ada probabilitas yang beragam yang bisa dikaitkan dengan

skema pengendalian di setiap entitas termasuk di dalamnya pengendalian secara otomatis ataupun manual. Berikut akan dipaparkan beberapa aktivitas pengendalian yang kategorinya erat dengan serangkaian aktivitas tertentu:

a. Otorisasi Transaksi

Konteks ini mengantongi tujuan spesifik yakni memeriksa atau memastikan kalau keseluruhan transaksi material yang sudah mengalami proses sedemikian rupa bersifat valid dan sesuai dengan tujuan pihak manajemen yang sudah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan lembaga usaha, otorisasi setiap transaksi hanya bisa dilimpahkan kepada individu yang memang mengantongi wewenang untuk memberikan persetujuan dari transaksi tersebut (Mulyadi, 2002:186). Kelompok tertentu atau perorangan yang memberikan jaminan otorisasi khusus untuk transaksi sudah sepantasnya memegang posisi yang sepadan dengan konsekuensi dari sifat dan besaran transaksi itu sendiri.

b. Pemisahan Tugas

Pembagian tugas pada suatu lembaga usaha sebenarnya memiliki dasar terhadap aneka prinsip yang bisa dijabarkan sebagai berikut (Mulyadi, 2002:188):

- 1) Memisahkan fungsi yang berkaitan dengan penyimpanan serta akuntansi.
- 2) Melakukan pemisahan terkait fungsi otorisasi dan penyimpanan.
- 3) Pemisahan terhadap fungsi otorisasi dan akuntansi.
- 4) Serta yang keempat melakukan pemisahan pada fungsi pengelolaan data elektronik yang mencakup fungsi perancangan sistem dan penyusunan program serta fungsi operasi fasilitas dalam upaya pengolahan serangkaian data yang ada.

c. Catatan Akuntansi

Accounting record atau catatan akuntansi yang berada di suatu lembaga usaha memuat berbagai cakupan isi terkait dokumen, sumber buku besar, ataupun

(Mulyadi, 2002:189). Diterangkan lebih lanjut kalau yang dimaksud an dokumen termasuk catatan di dalamnya termasuk objek fisik yang



ketika transaksi berlangsung akan diupayakan pemasukan dan pengikhtisaran pada dokumen yang diberikan label formulir. Formulir ini termasuk media yang bisa digunakan sebagai perekam dari penggunaan wewenang dalam menyediakan otorisasi bagi terwujudnya transaksi di organisasi yang bersangkutan. Dengan begitu penggunaan formulir harus benar-benar diawasi secara komprehensif guna melangsungkan pelaksanaan otorisasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Sari, (2013:6) menerangkan kalau aneka prinsip yang relevan memang harus dipatuhi dalam pembuatan rancangan dan penggunaan catatan sekaligus dokumen yang sifatnya pantas yakni ada anjuran:

- 1) Dilakukan proses persiapan saat transaksi berlangsung maupun selepasnya.
- 2) Berseri dan *prenumbered* untuk memudahkan proses pengendalian atas insiden dokumen yang hilang dan juga sebagai alat bantu saat dokumen itu ditempatkan.
- 3) Dilakukan perancangan yang mengembangkan sifat multiguna sehingga bisa menurunkan kemungkinan pencatatan dokumen yang berbeda.
- 4) Prinsip sederhana untuk memberikan jaminan kalau dokumen dan pencatatan bisa dimengerti secara gamblang.
- 5) Dilakukan perancangan bentuk yang menjadi dorongan atas sajian data yang memang memasukkan unsur pengecekan intern ke dalam formulir dan catatan yang dilibatkan.

d. Pengendalian Akses

Pengendalian akses ialah skema yang di dalamnya memiliki fungsi untuk memberikan kepastian personel yang memang sah secara hukum yang dengan kata lain mempunyai akses pada aktiva dari suatu perusahaan (Mulyadi, 2002:190). Cara terbaik untuk memberikan perlindungan pada aktiva tersebut sekaligus catatan yang relevan ialah dengan memberikan ketersediaan perlindungan yang sifatnya secara fisik misalnya penggunaan gudang untuk melindungi persediaan dari ancaman kerusakan, kemudian

nfaatan lemari besi atau kotak yang dirancang tahan dari kobaran api yang mempunyai wujud perlindungan surat berharga sekaligus uang yang sifatnya



tunai. Tidak berhenti sampai di situ karena perlindungan fisik juga bisa dilakukan pengupayaan catatan kembali oleh formulir yang rusak atau melibatkan alat elektronik dalam memudahkan pencatatan sistem akuntansi secara lebih efektif dan efisien.

e. Verifikasi Independen

Mulyadi, (2002:190) maksud dari verifikasi independen bisa diartikan sebagai bentuk pemeriksaan secara mandiri pada skema akuntansi guna melangsungkan pendeteksian atas unsur-unsur kesalahan dalam menyajikan suatu data yang penting. Perlu dipahami kalau 4 aktivitas pengendalian yang sudah dipaparkan sebelumnya butuh pengecekan intern secara berkesinambungan supaya pelaksanaannya bisa dipantau secara lebih efektif.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem yang melibatkan informasi dan komunikasi di dalam ranah akuntansi tentu mengantongi sejumlah tujuan yakni untuk memudahkan kegiatan memulai melakukan pencatatan, memproses, dan melaporkan setiap transaksi dalam suatu entitas guna menjaga akuntabilitas dari keseluruhan aset. Dalam konteks ini definisi informasi dan komunikasi sebenarnya sangat meluas untuk cakupannya sendiri.

Mengacu pakar bernama Mulyadi, (2002:189) disampaikan kalau sistem akuntansi yang terbilang efektif ialah skema yang bisa menyuguhkan rasa yakin secara memadai kalau transaksi telah dilakukan penghimpunan secara:

- a. Sah.
- b. Sudah diupayakan pencatatannya.
- c. Sudah dilakukan otorisasi secara maksimal.
- d. Sudah dinilai kadar wajarnya.
- e. Sudah dipastikan bahwa hal tersebut memang wajar.
- f. Sudah dilakukan pencatatan pada periode yang seharusnya.
- g. Telah dimasukkan pada buku pembantu yang memang diringkas untuk keperluan secara prosedural.



na komunikasi sendiri memiliki kaitannya dengan penyampaian informasi
seluruhan pihak yang memang dilibatkan saat laporan keuangan

dilakukan supaya mereka benar-benar memahami prosedur aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan orang lain baik di luar konteks organisasi ataupun di dalamnya. Mengacu gagasan Mulyadi, (2002:189) diterangkan kalau aneka pedoman mulai dari kebijakan akuntansi serta laporan keuangan beserta daftar dan memo juga termasuk elemen dari informasi dan komunikasi di struktur pengendalian intern.

5. Pengawasan

Pengawasan (*monitoring*) bisa didefinisikan sebagai serangkaian proses terhadap penilaian kualitas atas kinerja dari struktur pengendalian intern secara berkesinambungan atau periodik. Proses ini dilimpahkan kepada pihak yang memang mengemban pekerjaan sebagai pihak pengawas baik pada tahap desain ataupun operasi pengendalian di waktu yang dirasa paling tepat. Hal ini mengantongi sejumlah tujuan salah satunya menjadi penentu pengawasan intern telah bekerja sejalan dengan perubahan yang mengacu pada keadaan riil di dalam suatu perusahaan. Monitoring bisa diupayakan oleh bagian khusus yang diberikan label sebagai audit internal. Hal ini berkaitan dengan penilaian yang sejalan secara berkala terhadap kualitas pengendalian internal pihak manajemen guna menjadi penentu kalau pengendalian sudah terlaksana sesuai tujuan dan diupayakan modifikasi jika memang dibutuhkan atas konsekuensi perubahan keadaan di lapangan.

2.1.4 Jenis-Jenis Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi, (2002) menerangkan jenis-jenis pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian intern akuntansi, termasuk ke dalam komponen sistem pengendalian internal yang terdiri dari berbagai cakupan mulai dari struktur lembaga usaha, ukuran, dan metode yang telah dilakukan pengkoordinasian terutama untuk memupuk penjagaan aset dan pengecekan sekaligus keandalan data akuntansi yang dilibatkan. Dikatakan suatu pengendalian internal itu baik jika sudah mampu



memberikan jaminan atas aset perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya.

2. Pengendalian internal administratif, mencakup serangkaian struktur, ukuran, dan metode yang telah dilakukan pengkoordinasian guna menjadi pendorong secara efisien dan kelangsungan terpatuhinya kebijakan pihak manajemen.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi, (2002) guna meraih suatu tujuan dari pengendalian akuntansi maka suatu sistem wajib bisa memenuhi 6 prinsip sebagai pondasi dasar yang mencakup:

1. Pemisahan Fungsi
Bahasan pertama ini memiliki tujuan pokok yakni menghindari dan mengawasi secara langsung indikasi kesalahan atau sesuatu yang dinilai tidak wajar. Dengan diberlakukannya pemisahan fungsi bisa dijadikan salah satu strategi untuk mencapai efisiensi dari tugas yang dilaksanakan.
2. Prosedur pemberian wewenang
Kemudian untuk tujuan pada poin kedua ini berkaitan dengan pemberian jaminan kalau setiap transaksi telah diotorisasi oleh pihak yang memang memiliki wewenang di dalamnya.
3. Prosedur dokumentasi
Pendokumentasian secara layak sudah menjadi ketetapan yang penting guna memupuk sistem pengendali akuntansi secara lebih efektif. Oleh karenanya, dokumentasi menjadi pondasi dasar untuk menetapkan tanggung jawab guna mengimplementasikan pencatatan dan pelaksanaan dari kegiatan akuntansi itu sendiri.
4. Prosedur dan catatan akuntansi
Selanjutnya pada poin keempat memiliki tujuan yang sengaja disiapkan atas catatan akuntansi dengan teliti cepat dan akurat supaya bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang dengan tenggat waktu yang tepat.
5. Pengawasan fisik
Berkaitan dengan serangkaian alat yang bersifat elektronik maupun mekanik dalam upaya untuk melangsungkan pencatatan dan pelaksanaan dalam sistem transaksi yang sedang berlangsung.
6. Pemeriksaan internal secara bebas
Ada korelasi kuat pada perbandingan terkait catatan kekayaan dan aset yang memang ada dengan menghadirkan rekening kontrol dan mengadakan kalkulasi pada gaji pegawai. Hal demikian diwujudkan untuk tujuan pengawasan validitas data secara akurat dan terpercaya.

2.1.6 Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi, (2002:181) menekankan kalau suatu entitas telah menerangkan berbagai keterbatasan secara bawaan yang lekat pada setiap ma pengendalian internal yang bisa dijabarkan secara lebih rinci pada 1 berikut:

Kesalahan dalam pertimbangan



Acap kali pihak manajemen dan personel lain bisa terlibat benturan salah paham dalam usaha melakukan pertimbangan pada keputusan bisnis yang mana sebaiknya harus diambil atau yang tidak, bertalian dengan pelaksanaan tugas rutin karena merasa informasi yang ada belum sepenuhnya memadai, sekaligus ada korelasi pada waktu terbatas dan tekanan.

2. Gangguan

Selanjutnya bahasan mengenai gangguan dalam pengendalian yang sudah diputuskan bisa terjadi, salah satunya diakibatkan oleh personel yang secara keliru merepresentasikan pemahaman dari perintah, melakukan kesalahan karena sifat lalai, tidak ada perhatian secara intens, atau bisa karena faktor kelelahan terkait tuntutan pekerjaan yang sifatnya masif. Dinamika yang sifatnya permanen atau sementara pada personil maupun sistem dan prosedur juga bisa menjadi faktor tertentu yang mengakibatkan gangguan itu muncul.

3. Kolusi

Sebuah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai individu untuk meraih tujuan yang tidak baik awam dikenal dengan istilah kolusi. Kolusi ini tentu menimbulkan efek yang fatal pada pengendalian internal yang sebelumnya sudah dibangun dengan proteksi aset entitas dan tidak berusaha mengungkapkan ketidakberesan atau luputnya pendeteksian kecurangan oleh pengendali internal yang sudah dirancang sedemikian rupa.

4. Pengabaian oleh manajemen

Pihak manajemen bisa melakukan pengabaian terhadap kebijakan atau skema prosedur yang sudah diputuskan demi tujuan yang tidak sah, misalnya untuk keuntungan pribadi, penyajian keadaan keuangan yang disetting seolah berlebihan, atau untuk meraup kepatuhan keseluruhan komponen.

5. Biaya lawan manfaat

Pada faktanya biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pengoperasian pengendalian internal tidak bisa melebihi kapasitas manfaat yang sudah diharapkan dari pengendalian internal itu sendiri. Hal ini karena pengukuran secara akurat baik yang berhubungan dengan biaya atau manfaat cenderung tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Selain itu, pihak manajemen wajib melakukan perkiraan dan pertimbangan data baik secara kualitatif ataupun kuantitatif dalam proses evaluasi biaya dan pemanfaatan suatu pengendalian yang hendak dicanangkan.

2.1.7 Pengertian Persediaan

Menurut Kieso et al., (2010) memberikan pengertian terkait definisi *inventory* atau persediaan yang merujuk kepada pos aktiva yang dipunyai untuk kemudian dimanfaatkan dalam skema penjualan operasional bisnis normal atau

yang memang diperuntukkan bagi konsumen dalam memproduksi barang yang tidak dijual belikan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, (2018:14) bahwa



yang dimaksud dengan persediaan termasuk aset yang ada untuk keperluan jual beli dalam bisnis, pada proses produksi sendiri untuk keperluan penjualan, sementara dalam bentuk bahan atau kelengkapan diperuntukkan bagi proses pengadaan produk atau penyuguhan jasa. Pengertian persediaan yang mana melekat dengan aset suatu perusahaan yang sifatnya sangat krusial karena kehadirannya memiliki pengaruh secara langsung pada kecakapan perusahaan tersebut untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan (Rudianto, 2012:222). Menurut Syakur, (2015:152) diterangkan kalau ada tiga metode penilaian persediaan yang secara general dilibatkan yakni dengan metode *FIFO (first-in, first-out)*, *LIFO (last-in, last out)*, dan biaya rata-rata (*average cost method*). Angelina Klesia K. et al., (2017:133) yang dimaksud sebagai metode pencatatan persediaan barang dagangan dalam skema akuntansi ada dua yaitu secara fisik atau periodik dan metode perpetual atau terus-menerus.

Menurut Soemarso, (2009) maksud dari persediaan barang dagang ialah serangkaian barang yang dipunyai suatu lembaga usaha untuk keperluan penjualan kembali. Persediaan ini umumnya terdiri dari berbagai jenis barang yang jumlahnya cukup banyak dan termasuk komponen yang memiliki arti dari serangkaian keseluruhan aktiva lembaga usaha. Menurut Herjanto, (2010:237) Memberikan keterangannya kalau persediaan atau *inventory* ini termasuk barang atau bisa juga dikaitkan dengan bahan yang sengaja disimpan untuk selanjutnya dipergunakan demi memenuhi suatu tujuan yang telah ditetapkan, misalnya penggunaan proses produksi atau perakitan, dilakukan penjualan kembali, atau hanya sebatas suku cadang dari alat atau mesin tertentu. Menurut Ristono, (2009:4) dengan pengadaan barang yang tersedia ini maka perusahaan bisa

ni serangkaian permintaan dan kebutuhan pasar secara lebih maksimal
t dari segi estimasi waktu. Guna menjaga produksi secara berkelanjutan



sekaligus menjaga nama baik perusahaan agar tidak mengalami insiden kehabisan persediaan yang bisa menjadi faktor penghambat dari proses produksi yang tentunya tidak diharapkan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, (2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 tahun 2018 menyatakan:

1. Pada skema produksi untuk dioptimalkan penjualan.
2. Dalam wujud bahan baku atau perlengkapan diupayakan pada proses produksi atau kehadiran suatu jasa.
3. Tersedia untuk selanjutnya dilakukan penjualan kembali dalam unit aktivitas berusaha seperti umumnya.

Berlandaskan gagasan yang sudah dikemukakan di atas maka bisa ditarik sebuah konklusi yang merujuk pada pengertian persediaan yang terdiri atas bahan baku, barang saat proses, barang jadi, serta barang dagang. Berpijak pada fakta tersebut bisa dipahami bersama kalau ada perbedaan menyangkut lembaga usaha yang ranahnya manufaktur atau yang ranahnya dagang jika diamati dari hal-hal yang menjadi persediaannya. Pada lembaga usaha dengan fokus di manufaktur tentu persediaannya condong kepada bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi. Sebaliknya, untuk lembaga usaha dagang biasanya hanya memuat barang dagangan saja. Seperti yang sudah disinggung pada paragraf sebelum-sebelumnya, persediaan menjadi komponen sangat krusial pada proses berlangsungnya kegiatan operasional suatu perusahaan. Hal ini mengingat persediaan bisa menjadi faktor penentu terhadap tingkat profitabilitas yang didapatkan perusahaan tersebut terutama yang ranahnya dagang yang memberi keuntungan paling besar didapatkan dari selisih harga beli dan jualnya. Ketika persediaan yang dipunyai lembaga usaha dikatakan sangat memadai, maka tidak menutup kemungkinan kalau ada harapan untung yang bisa dicapai dengan maksimal, akan tetapi ketika persediaan itu tidak sepenuhnya maksimal

ingat mungkin bisa mendatangkan dampak berupa penurunan omset.



2.1.8 Jenis-Jenis Persediaan

Dalam suatu kegiatan usaha, pastinya jenis persediaan bisa bervariasi sesuai bidangnya. Berdasarkan bidang usahanya, bisa dibagi ke dalam bentuk perusahaan industri, jasa, dan dagang.

1. Menurut Warren, (2016:343) memberikan keterangan kalau persediaan di setiap lembaga usaha memiliki tingkat perbedaan dengan aktivitas bisnis yang dipilih. Berikut akan disampaikan klasifikasinya:
 - a. Persediaan barang baku, dikaitkan dengan wujud barang yang telah dibeli atau didapatkan dengan cara lain (Warren, 2016:343). Misalnya menabung atau disimpan untuk digunakan secara langsung pada pembuatan barang yang nantinya akan dilakukan penjualan secara ulang.
 - b. Persediaan barang pada skema proses barang yang memuat bahan-bahan yang sudah melewati tahap pemrosesan tetapi masih butuh pekerjaan lanjutan sebelum diputuskan penjualannya (Warren, 2016:343). Hal ini pada mempertimbangkan berbagai hal mulai dari jumlah harga pokok bahan bakunya, biaya pegawai yang bekerja secara langsung, serta biaya overhead pabrik yang sudah dikerahkan, sampai ke estimasi waktu yang berlangsung.
 - c. Barang jadi, merujuk kepada barang yang memang sudah melewati tahap selesai produksi dan dinyatakan siap untuk didistribusikan secara teknik pemasaran (Warren, 2016:343). Ketersediaan dari produk jadi sendiri mencakup keseluruhan barang yang sudah dirampungkan dari prosesnya dan dinyatakan siap untuk dijual secara khalayak. Produk jadi umumnya mendapatkan penilaian sebesar jumlah harga dari bahan baku, biaya terkait tenaga kerja yang dilibatkan, serta biaya overhead pabrik yang dibutuhkan guna menghadirkan produk tersebut secara masif.



- d. Persediaan barang penolong, bisa diartikan sebagai keseluruhan barang yang dipunyai untuk kepentingan produksi (Warren, 2016:343). Namun tidak termasuk kategori bahan baku yang menjadi pembentuk produk itu hadir.
2. Menurut Sadam, (2015:6) menambahkan keterangannya perihal jenis-jenis persediaan menurut fungsinya, yakni:
- Batch Stock*, diperuntukkan pengadaannya dengan mempertimbangkan pembelian atau pembuatan serangkaian barang dan bahan dalam kuantitas lebih besar ketimbang jumlah yang dibutuhkan di waktu tersebut.
 - Fluctuation Stock*, sengaja diadakan untuk menjadi benteng dalam menghadapi fluktuasi permintaan pasar yang sifatnya sangat sulit untuk diprediksi angka akuratnya.
 - Anticipation Stock*, diwujudkan untuk menghadapi kondisi fluktuasi permintaan yang bisa diprediksi secara akurat sesuai pola musiman yang ada pada kurun tahunan dan untuk menghadapi para pengguna, penjual, serta permintaan yang dirasa kian mengalami peningkatan secara signifikan.
3. Menurut Matius, (2016:114) memberikan tambahan keterangan kalau setiap jenis persediaan mempunyai karakteristik khas dan cara kelola yang tentunya berbeda. Persediaan bisa dibedakan sesuai jenisnya, meliputi:
- Persediaan bahan mentah (*raw material*), bisa dikaitkan dengan serangkaian barang yang sifatnya berwujud (Matius, 2016:114). Contohnya kayu, baja, atau komponen lain yang memang dibutuhkan saat proses produksi dilakukan. Bahan mentah ini bisa didatangkan dari berbagai sumber alam, dibeli dari pihak pemasok, atau bisa juga dibuat oleh lembaga usaha terkait untuk selanjutnya diperuntukkan bagi proses produksi tahap lanjutan.
 - Persediaan komponen rakitan (*purchased parts or components*) (Matius, 2016:114). Hal ini memuat serangkaian komponen yang didapatkan dari lembaga usaha lain baik secara langsung bisa dirakit untuk menjadi produk bernilai.



- c. Persediaan bahan pembantu (*supplies*) (Matius, 2016:114). Hal ini dikaitkan dengan barang yang dibutuhkan untuk menunjang produksi, tapi bukan termasuk komponen dari barang jadi.
- d. Persediaan barang dalam proses (*work in process*) (Matius, 2016:114). Dikaitkan dengan aneka barang yang termasuk luaran di tiap bagian saat produksi dilakukan atau yang sudah melewati tahap pengolahan sebagai bentuk kesatuan akan tetapi masih butuh proses lanjutan untuk menghasilkan suatu barang yang dinilai telah jadi secara utuh.
- e. Persediaan barang jadi (*finished goods*) (Matius, 2016:114). Maksudnya adalah serangkaian barang yang telah dinilai sudah jadi proses dan pengolahannya serta siap untuk dilakukan pengiriman atau penjualan kepada pasar. Dengan demikian, bisa ditarik konklusi terkait persediaan barang dagang yang memiliki berbagai karakteristik mulai dari barang baku, setengah jadi, barang jadi, serta barang yang golongannya sebagai penolong. Perlu dipahami juga kalau setiap jenisnya mempunyai karakteristik secara khas dan pengelolaannya pun menerapkan metode yang tentunya berbeda-beda.

2.1.9 Fungsi Persediaan

Menurut Anik Rufaidah, (2018:41) memberikan penjelasan terkait fungsi persediaan, yakni:

1. Fungsi *Decoupling*, mengarah pada persediaan yang memiliki angka probabilitas lembaga usaha untuk bisa melakukan pemenuhan terhadap permintaan para konsumen tanpa adanya unsur ketergantungan pada pihak supplier. Diadakan persediaan bahan mentah supaya lembaga usaha terkait tidak secara penuh merasa tergantung pada skema pengadaan soal kuantitas dan waktu untuk mengirimkannya. Hal ini sengaja diupayakan supaya departemen terkait dan proses individualisasi perusahaan bisa terjaga maksud dari kebebasan. Kemudian untuk persediaan barang jadi memang dibutuhkan demi menutupi permintaan pasar yang sifatnya masih tidak pasti. Ketersediaan ini memang ditempuh untuk menjadi strategi dalam menghadapi fluktuasi permintaan dari pihak konsumen yang



sangat sulit untuk diprediksi atau dalam istilah ekonomi dikenal dengan *fluctuation stock*.

2. Fungsi *Economic Lot Sizing*. Selanjutnya pada poin kedua ini memang sengaja dipertimbangkan untuk kepentingan penghematan termasuk biaya angkut per unit agar lebih terjangkau dari segi biaya yang harus dikerahkan. Penetapan ini dilakukan karena lembaga usaha terkait melaksanakan pembelian yang biasanya dalam jumlah lebih besar ketimbang biaya yang timbul karena besaran persediaan itu sendiri, misalnya terkait sewa gedung, investasi, risiko dan lain sebagainya.
3. Fungsi Antisipasi, lekat dengan strategi pihak perusahaan untuk menghadapi fluktuasi angka permintaan yang bisa diperkirakan atau diprediksi sesuai pengalaman atau data di masa lampau, yaitu merujuk pada permintaan yang sifatnya musiman. Pada konteks ini perusahaan terkait bisa mengupayakan ketersediaan secara musiman. Kemudian mempertimbangkan terkait estimasi waktu pengiriman dan permintaan di waktu periode tertentu yang diupayakan tingkat prediksinya. Konteks tersebut mengacu pada keperluan perusahaan untuk menyediakan persediaan secara ekstra atau istilahnya *safety stock*.

Assauri, (2016:226) menambahkan keterangan terkait persediaan yang bisa menghadirkan berbagai fungsi yang mana salah satunya bisa meningkatkan fleksibilitas dari kegiatan operasional produksi dari lembaga usaha terkait. Berikut sejumlah fungsi yang diberikan untuk persediaan, meliputi:

1. Inventory termasuk usaha antisipasi stok, mengingat hal ini bisa dipupuk rasa puas yang menjadi pengharapan para konsumen. Dengan begitu fungsi pertama yakni mengacu pada pemenuhan antisipasi dari pelanggan terkait unsur permintaan yang timbul.
2. Sebagai pemisah berbagai komponen dari kegiatan mengoperasikan produksi sehingga bisa melakukan penghindaran atas hambatan karena fluktuasi mengingat sudah ada inventory extra yang berfungsi atas terpisahnya proses operasi produksi dan pemasok.
3. Sebagai pemisah dari kegiatan operasional lembaga usaha dari kondisi fluktuatif permintaan dan menghadirkan stok barang yang memberi probabilitas

diupayakan seleksi pihak pelanggan. Dalam hal ini inventory termasuk satu jenis usaha dalam pembangunan ritel secara kompleks.



4. Kedudukan inventory memiliki fungsi dalam upaya kelancaran setiap kegiatan operasional produksi yang mana hal tersebut bisa memberi kemudahan atas pembangunan rasa percaya dalam menghadapi pola musiman sehingga label yang sering melekat pada inventory jenis ini disebut inventory musiman.
5. Supaya bisa mengoptimalkan diskon dari segi jumlah, dilakukan putusan untuk membeli dalam skala besar supaya bisa meminimalkan atau memangkas biaya pengiriman atau barang yang dirasa mengalami pembengkakan.
6. Guna menjadi pemisah dalam skema produksi dan kejadian, maka dari itu inventory dilibatkan sebagai pondasi antara keberhasilan di ranah tersebut. Untuk selanjutnya secara berkesinambungan kegiatan pengoperasian produksi bisa dilakukan penjagaan secara maksimal dan bisa diupayakan untuk dihindari ketika ada insiden kerusakan alat yang bisa mempengaruhi produksi secara temporer.
7. Sebagai bentuk perlindungan dari kekurangan stock yang dirasakan lembaga usaha terkait. Hal ini cenderung disebabkan oleh lambatnya kedatangan barang atau ada unsur peningkatan dari konsumen, sehingga muncul probabilitas risiko kekurangan pasokan.
8. Guna menjadi pagar atas fenomena inflasi atau peningkatan harga.
9. Dimanfaatkan untuk meraup keuntungan atas siklus pesanan dengan mekanisme meminimalkan pembelian dan persediaan terkait biaya dengan cara membeli dalam jumlah yang melebihi kebutuhan saat itu.
10. Guna memungkinkan lembaga usaha terkait untuk lebih memudahkan kegiatan operasionalnya dalam hal penambahan barang secara segera, seperti penggunaan barang yang saat itu sedang dalam proses.



alan dengan paparan yang sudah disampaikan di atas, maka bisa ditarik i kalau persediaan memiliki angka probabilitas pada lembaga usaha

memenuhi permintaan para konsumen tanpa ada indikasi ketergantungan oleh pemasok. Sebab itu, apa yang dimaksud dengan persediaan ini menjadi pengharapan bersama agar jumlah yang ada bisa optimal supaya kegiatan operasional perusahaan bisa terjaga secara berkelanjutan. Kemudian persediaan juga didambakan tersedia secara masif untuk menarik keuntungan dari siklus pesanan dengan cara meminimalkan biaya persediaan dan pembelian.

2.1.10 Faktor-faktor yang mempengaruhi Persediaan

Bahasan selanjutnya mengenai ragam faktor yang memberikan pengaruh terhadap besaran maupun kecilnya angka persediaan bahan baku yang dimiliki suatu perusahaan (Rondonuwu et al., 2016:270):

1. Kaitannya dengan harga beli untuk mendapatkan keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan.
2. Keseluruhan anggaran untuk keperluan produksi.
3. Keseluruhan biaya untuk kebutuhan penyimpanan bahan baku yang biasanya melibatkan gudang.
4. Ketepatan dari pihak pemasok atau yang menjual bahan baku.
5. Ketepatan dari proses pembuatan standar pakai bahan baku.

2.1.11 Metode Pencatatan Persediaan

Terdapat 2 jenis metode pencatatan persediaan, ialah:

1. Sistem Periodik

Menurut Lubis, (2010) disampaikan kalau pada metode periodik, keseluruhan informasi terkait jumlah fisik persediaan hanya bisa diketahui pada masa akhir periode olahan akuntansi. Sistem ini menjadikan perhitungan fisik secara aktual atas serangkaian bahan yang ada untuk diselenggarakan pada akhir periode akuntansi saat laporan keuangan disiapkan. Selanjutnya menyangkut aneka barang dilakukan proses perhitungan, penimbangan, atau pengukuran, dan jumlah tersebut dilakukan pengkalian terhadap biaya per unitnya untuk memberi penilaian

ediaan yang masih ada. Pencatatan atas tersedianya suatu barang yang lakukan kalkulasi dapat dibuat perhitungannya dan diketahui jumlah



barang yang hendak dijual dan dibeli, serta saldo yang masih sisa. Perlu dipahami kalau pembelian diarahkan ke debit akun pembelian sedangkan ayat jurnal akhir periode dilakukan pembuatan untuk maksud penutupan akun pembelian, persediaan awal, sekaligus pencatatan ketersediaan akhir sebagai bagian dari aktiva.

2. Sistem Perpetual

Menurut Lubis, (2010) kalau sistem persediaan dari perspektif perpetual ini mengarah pada peran akuntan yang diberikan tuntutan untuk mengadakan skema pencatatan secara berkesinambungan pada jumlah fisik tersedianya barang dagangan. Pencatatan tersebut harus menghadirkan serangkaian informasi terkait penerimaan, pengeluaran, dan yang terpenting saldo yang masih tersisa. Dengan begitu, jumlah secara fisik dan penilaian barang yang ada secara riil bisa diketahui tersedia atau tidaknya setiap saat. Oleh karenanya, perhitungan dengan skema ini cenderung tidak dibutuhkan hanya saja dilakukan untuk keperluan verifikasi jumlah ketersediaan. Perhitungan dari segi fisik umumnya dilakukan secara periode tahunan untuk keperluan audit yang dikomparasikan persediaan dengan catatan perpetual serta menyatakan pada data untuk keperluan jurnal akuntansi yang disesuaikan atas kebutuhan. Penting untuk dipahami kalau catatan ketersediaan ini harus disepadankan ke perhitungan fisik jika ada perbedaan dalam mekanisme pencatatannya.

2.1.12 Metode Penilaian Persediaan

Menurut Hery, (2015:242) menerangkan kalau yang dimaksud dengan akuntansi ialah lekat dengan aneka metode yang bisa dilibatkan dalam skema perhitungan terkait besaran nilai atas akhir dari suatu persediaan, mencakup:

1. Metode *FIFO* (*first-in, first out*)

Mengarah pada harga pertama kali barang tersebut dibeli yang bagaimanapun diakui sebagai harga pokok dalam skema penjualan. Metode ini memiliki arti kalau barang yang awal dibeli termasuk di dalamnya harga pokok utamanya. Dengan metode tersebut nilai



persediaan akhir ialah harga pokok dari pembelian barang terakhir kalinya dibeli.

2. Metode *LIFO (last-in, first-out)*

Pada metode ini ditekankan kalau harga pokok barang terakhir kali dilakukan pembelian tersebut memang diakui sebagai harga pokok dari penjualan pertama kalinya. Metode ini tidak mengantongi arti kalau barang yang dibeli terakhir ialah barang yang dijual pertama kalinya. Sama dengan metode sebelumnya ada penekanan kalau bukan merujuk ke kondisi fisik barang tapi menekankan pada harga secara pokoknya. Metode ini sengaja dilibatkan untuk menjadikannya nilai persediaan akhir yang mengarah ke harga pokok barang saat pertama kali dilakukan proses pembelian.

3. Metode Rata-Rata (*Average*)

Dasar dari metode ini ialah asumsi kalau ketersediaan barang untuk proses penjualan termasuk sejenis alias homogen. Metode ini menitikberatkan pada harga perolehan barang yang ada untuk kemudian dilakukan proses penjualan dengan dasar harga perolehan secara rerata yang berhasil tertimbang dengan proporsional. Metode ini menjadikan asumsi kalau nilai persediaan akhir termasuk bagian dari himpunan harga pokok rerata persediaan itu sendiri, oleh karenanya nilai persediaan ataupun harga pokok dari barang yang akan dilakukan penjualan senantiasa memiliki elemen yang pastinya sama pada harga pokok yang sudah terhimpun dari persediaan tersebut. Metode demikian melakukan perhitungan harga pos-pos yang ada pada persediaan dengan dasar biaya rerata barang yang juga tersedia saat periode tertentu. Dengan digunakan metode ini maka inflasi akan mewujudkan jumlah antara dua metode sebelumnya yang sudah disebutkan. Dengan dengan kata lain, akumulasi HPP metode ini memiliki kedudukan antara dua metode sebelumnya, termasuk jumlah persediaan akhir dan laba kotor di dalamnya.

2.1.13 Biaya-Biaya Persediaan

Yang dimaksud dengan biaya persediaan bisa diartikan sebagai serangkaian biaya yang muncul akibat persediaan itu sendiri.

Paulina, (2015:13) menerangkan kalau biaya yang muncul dari persediaan bisa dijabarkan pada poin di bawah ini:

1. Biaya Penyimpanan (*Holding cost*), termasuk kategori biaya untuk proses penyimpanan pada estimasi waktu yang sudah ditetapkan. Hal ini juga ada sangkut pautnya dengan barang usang atau biaya terkait penyimpanan yang biasanya diletakkan di area gudang.
 2. Biaya Pemesanan (*Ordering Cost*), Ini acap kali timbul saat proses pemesanan berlangsung, termasuk serangkaian biaya yang ranahnya ke topik administrasi pemesanan, formulir, dan hal-hal lain yang cakupannya tidak jauh-jauh dari proses pemesanan.
- Biaya Pemasangan (*Setup Cost*), ini hadir guna melangsungkan proses persiapan mesin atau hal-hal produksi ketika barang atau komponen



yang memang dibutuhkan sengaja diproduksi secara mandiri oleh perusahaan yang bersangkutan, termasuk biaya kebersihan atau perawatan dari alat produksi yang ada.

2.1.14 Model-Model Persediaan

Menurut Matius, (2016:115) Model Persediaan untuk permintaan independen ada tiga yaitu:

1. Model Kuantitas Pesanan Ekonomi (EOQ)

Topik ini dapat diartikan sebagai teknik untuk kelangsungan pengendalian atas ketersediaan barang yang sering kali dipergunakan. Teknik pertama ini relatif mudah diaplikasikan tetapi perlu pertimbangan dasar mengenai asumsi-asumsi lain, seperti halnya jumlah permintaan yang sudah diidentifikasi, waktu tunggu secara konstan, ketidaksediaan diskon dari segi kuantitas, persediaan dalam kebutuhan perjalanan, serta aneka biaya variabel terkait dan tidak lupa biaya kekurangan atas persediaan yang bisa dihindari.

2. Model Kuantitas Pesanan Produksi

Model kedua ini bisa diaplikasikan pada dua situasi pertama yakni ketika persediaan mengalami aliran atau penumpukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu selepas ditematkannya sebuah pesanan. Yang kedua ketika unit yang dihasilkan atau yang dilakukan skema penjualan yang menyasar secara menyeluruh. Pada kondisi demikian lembaga usaha terkait akan melangsungkan proses penghitungan pada tingkat produksi harian dan permintaan harian. Hal ini mempertimbangkan lingkungan produksi yang biasanya disebut sebagai *production order quantity model*.

3. Model Diskon

Model ini termasuk kategori pengurangan harga untuk keperluan pemberian barang jika melakukan pembelian dalam segi kuantitas yang masif untuk keperluan peningkatan marketing itu sendiri.

2.1.15 Pengendalian Internal Persediaan

Menurut Herjanto, (2010:237)(Meydita Lineke Kawatu et al., 2020) menerangkan secara gamblang kalau pengendalian dari segi internal persediaan bisa diberikan definisi layaknya serangkaian kebijakan atas kendali untuk memberi penentuan pada tingkat ketersediaan yang memang harus dilakukan penjagaan, kapan sebaiknya pemesanan dilakukan, serta berapa pesanan yang memang harus diwujudkan secara implementatif.

Menurut Mulyadi, (2002:187) menjelaskan kalau unsur pengendalian internal bisa diklasifikasikan pada tingkat 3 kelompok berikut:

Organisasi

- a. Perlu menekankan perhitungan secara fisik pada persediaan oleh panitia yang memuat fungsi pemegang kartu ketersediaan secara fisik, fungsi pengecekan, dan perhitungan.



- b. Pihak panitia yang telah dilakukan pembentukan tersebut wajib memuat berbagai karyawan selain karyawan yang memiliki fungsi pada aktivitas gudang dan akuntansi persediaan mengingat kedua fungsi tersebut yang justru diupayakan pengevaluasian atas tanggung jawab yang diembannya.
2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
 - a. Penandatanganan oleh ketua panitia mengenai daftar perhitungan fisik persediaan.
 - b. Melakukan pencatatan pada hasil perhitungan fisik persediaan yang didasarkan pada kartu hitung fisik yang sudah ditelaah secara kebenarannya oleh pemegang yang bersangkutan.
 - c. Harga satuan wajib dicantumkan pada daftar hasil hitung fisik yang asalnya dari kartu persediaan tersebut.
 - d. Adjustment pada kartu persediaan memuat dasar informasi bersifat kualitas ataupun harga pokok di tiap jenis persediaan yang memang sudah tercantum pada daftar hitung fisik.
 3. Praktik yang Sehat
 - a. Kartu hitung fisik yang memiliki nomor urut dilakukan pencetakan dan penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan pada fungsi pemegang yang diberikan limpahan wewenang.
 - b. Hitung fisik pada setiap jenis persediaan diwujudkan dalam skema dua kali periode secara independen yang mana awalnya oleh pihak penghitung dan yang kedua oleh pihak pengecek yang bertanggung jawab.
 - c. Terkait kualitas data persediaan yang lain sebaiknya dicantumkan ke bagian 3 dan 2 dari kartu hitung fisik untuk selanjutnya dilakukan pencocokan terkait fungsi pemegang kartu sebelum data tersebut dicantumkan ke bagian 2 dari kartu perhitungan fisik yang lantas dihimpun dari segi pencatatan dalam daftar hasil hitung fisik.
 - d. Terkait peralatan dan metode yang dilibatkan guna melangsungkan pengaturan dan penghitungan terkait kualitas persediaan sudah harus bisa dijamin akan ketelitiannya dalam perannya.

2.1.16 Prosedur-Prosedur Pengendalian Persediaan Barang Dagang

Perusahaan dagang memuat barang dagangan yang bisa diterima dengan asalnya dari transaksi pembelian dengan cakupan berbagai komponen berikut:

1. Skema terima barang yang ada eksistensi transaksi pembelian diwujudkan pada bagian pembelian itu sendiri dengan dasar surat permintaan pembelian. Ini berarti tidak ada transaksi tanpa permintaan dari bagian yang memang membutuhkan barang tersebut. Permintaan pembelian barang tersebut



ikan pembuatan oleh pihak yang memang diberikan amanah dalam penjualan atau bagian gudang (Kristin Marlina, 2020:16). Lebih lanjut

dapat dipaparkan kalau bagian gudang sendiri berada di bawah naungan pengawasan dari bagian marketing atau penjualan. Barang yang hendak dilakukan proses pengiriman oleh pemasok disesuaikan dengan keterangan yang termuat pada surat pembelian kemudian diterima oleh bagian yang memang menjalankan tugas sebagai penerima barang.

2. Mekanisme penyimpanan dan pengeluaran dari barang itu sendiri bisa dilibatkan dengan mempersiapkan tempat yang memang secara khusus diperuntukkan bagi penyimpanan barang yang hendak diterima dengan mempertimbangkan sifat dari barang itu sendiri, apakah mudah rusak, bisa bertahan lama, bisa peka pada kondisi suhu, dan lain-lain. Selanjutnya tindakan tersebut akan menerima tembusan berupa SOP dari bagian yang melakukan kegiatan pembelian, untuk selanjutnya melakukan penerimaan barang serta tembusan laporan dari bagian penerimaan dan tidak lupa melakukan pengecekan data laporan dengan tembusannya berupa surat order. Penyimpanan barang dengan penataan yang baik pastinya memperhatikan urutan dari barang yang masuk maupun keluar atau yang tersedia sekaligus ketika barang tersebut keluar harus sesuai alat bukti dari permintaan dan pengeluaran barang yang berarti harus ada bukti secara otentik dengan pencatatan kuantitas yang diterima dan dikeluarkan pada kartu bidang.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berbagai temuan ilmiah terdahulu bisa dijadikan referensi bagi pihak peneliti dalam melaksanakan riset ini. Berikut akan dipaparkan secara lebih gamelan hasil temuan penelitian terdahulu.



Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lisa, Jenny & Sherly, 2017	Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Berdasarkan COSO pada CV. Kombos Tendea Manado	Skema pengawasan dalam praktik bekerja untuk menunjang implementasi budaya sehat dalam melaksanakan fungsi dan tugas pada lembaga usaha yang dijadikan subjek penelitian nampaknya sudah diimplementasikan dengan perwujudan transaksi jual beli parts yang diupayakan oleh berbagai bagian terkait dan telah melibatkan desain dokumen yang bisa dinyatakan baik. Akan tetapi masih butuh perhatian secara mendalam pada audit internal yang hendak melangsungkan pemeriksaan pada unsur pengendalian intern perusahaan tersebut. Kemudian menyangkut faktor pelaksanaan penerimaan karyawan juga mendatangkan pengaruh secara efektif pada suatu sistem pengendalian karena erat



No.	Peneliti	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
			kaitannya dengan faktor keluarga dan tingkat pendidikan yang nampaknya belum sejalan dengan apa yang memang dibutuhkan di lapangan.
2	Sitti Amanah Tontoli , Inggriani Elim , Victorina & Tirayoh,2017	Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang pada PT.Kimia Farma Apotek 74 Manado	Temuan dalam riset ini menekankan pada aktivitas pengendalian pada lembaga usaha yang dijadikan objek riset terkait kebijakan dan serangkaian prosedur yang diimplementasikan guna memperoleh jaminan kalau sistem yang dijalankan sudah berlangsung secara efektif dan ada proses pengawasan yang biasanya dilakukan pihak manajer bisnis dengan dibantu oleh beberapa personil bagian internal auditor dari kantor pusat dengan sistem pemantauan langsung dan pemeriksaan aktivitas yang hendak terjadi di mana dua hal tersebut melakukan penilaian dengan mekanisme terpisah untuk



No.	Peneliti	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
			kemudian dilakukan proses diskusi dan pengadaan perbaikan jika ada hal-hal yang memang butuh pembenahan.
3	Pujiono dan Julharman Asverawan Shim, 2019	Analisis Pengendalian Internal atas Persediaan Barang Dagang pada Toko Permai Pekanbaru	Temuan dalam riset tersebut khususnya yang mengarah pada komponen aktivitas pengendalian atas ketersediaan barang dagang di tempat yang dijadikan subjek riset dinyatakan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal demikian karena faktor perbedaan terkait ketersediaan barang secara fisik dan yang terhimpun di sistem komputerisasi. Ini dikarenakan lembaga usaha terkait masih belum maksimal dalam melakukan proses pengecekan secara rutin.
4	Brenda Meydita Lineke Kawatu, Jantje J. Tinangon dan Natalia Y. T. Gerungai, 2020	Analisis Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagangannya pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Manado	Dari hasil temuan riset tersebut dipaparkan kalau sistem pengendalian internal atas barang dagangan yang tersedia pada lembaga usaha terkait memiliki korelasi pada 5 komponen pengendalian internal sesuai COSO. Kelimanya



No.	Peneliti	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>memuat pengendalian risiko, lingkungan pengendalian, informasi, komunikasi, dan aktivitas pengendalian. Temuan dalam riset tersebut menyatakan kalau keseluruhan 5 komponen sudah diterapkan secara efektif tapi tetap masih ada beberapa poin kekurangan, contohnya komponen lingkungan pengendalian pada PT Daya Anugrah Mandiri cabang Manado kalau belum memiliki bagian akuntansi yang mana hal tersebut termasuk komponen krusial pada lembaga usaha. Selain itu, aktifitas pengendalian terutama yang berkaitan dengan aset fisik dan pencatatan masih belum ada kamera pengawas di bagian gudang yang mana hal ini bisa memberikan bantuan perlindungan atas ketersediaan barang secara real di lapangan dan bisa menghindari tindakan kejahatan salah satunya pencurian barang.</p>



No.	Peneliti	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
5	Nadia Ayu Cahyaningsih, Praptiningsih & Yoyoh Guritno, 2021	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Persediaan Barang Dagang pada PT. XYZ	PT XYZ sudah melakukan penetapan terkait tugas dan tanggung jawab yang dipisah dengan mekanisme yang lebih efektif ketika ada kaitannya dengan aktivitas penerimaan pesanan dari pelanggan yang dilakukan pada bagian marketing. Selain itu melibatkan juga kegiatan penerimaan pengeluaran sekaligus penyimpanan material di bagian gudang. P berlanjut bahwa kegiatan pengiriman barang dagang dilaksanakan pada bidang logistik. Sementara untuk accounting dan finance condong pada tugas penagihan dan pencatatan secara akuntabilitas. Dengan sekat pemisah fungsi tersebut sudah bisa dikatakan kalau penyelenggaraan perusahaan sangat baik dan merefleksikan transaksi yang sebenarnya.

Sumber. Diolah dari berbagai penelitian terdahulu

2.3. Kerangka Pemikiran



nelitian ini melibatkan salah satu kantor, agen gas elpiji 3 Kg yang di Kabupaten Gowa. Penelitian ini akan menggunakan beberapa laporan

persediaan sebagai bahan untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sistem pengendalian internal atas persediaan gas elpiji 3kg yang dilakukan di kantor PT. Naska Perkasa dengan menggunakan metode COSO. Kemudian hasil analisis sistem pengendalian internal PT. Naska Perkasa akan diukur berdasarkan COSO yaitu lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Alur persediaan gas elpiii 3 kg juga akan dilakukan pengamatan mengenai prosedur pembelian, penyaluran dan pengantara kepada konsumen. Hasil penelitian, ini akan menunjukkan beberapa laporan persediaan yang dihasilkan tiap bulannya oleh PT. Naska Perkasa, dan juga akan menganalisis masalah apa saja yang terjadi apabila didapatkannya analisi perbandingan serta rekomendasi untuk mencerminkan pengetahuan mengenai pokok persoalannya dalam arti apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

